

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018



BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN



VISI

*Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui
Tertib Administrasi dan Pelayanan Prima Serta Didukung Oleh Peran Aktif Masyarakat*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmatNya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Badan Pendapatan merupakan suatu bagian dari rangkaian sistem perencanaan Pemerintah Daerah, dimana Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pelaksana dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerjanya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan harus menyusun suatu program kerja menurut tugas pokok dan fungsinya. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, rencana kerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai, hal ini diarahkan untuk pemenuhan target yang ditetapkan pada rencana kerja. Penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2018.

Selanjutnya kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan rencana kerja ini terdapat kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2018, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga dokumen rencana kerja ini bermanfaat sebagaimana mestinya.

Painan, Januari 2018

**Kepala Badan Pendapatan
Kabupaten Pesisir Selatan**



DASRIANTO PUTRA, S.Sos, Msi
NIP. 19731230 199403 1 003

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah. Dalam Pelaksanaan dan Implementasi program dan kegiatan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pendapatan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan merumuskan program dan kegiatannya guna memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara tertib, efektif, transparan, akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan melalui Rencana Strategis (Renstra) maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan perencanaan secara sistematis dan berkesinambungan (tahunan) yang diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kinerja tahunan sebagai wujud dari kinerja organisasi perangkat daerah pada tahun 2018, ini

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
13. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
14. Peraturan Bupati kabupaten pesisir selatan nomor 41 Tahun 2016 tentang kedudukan, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Badan Pendapatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang Pendapatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai acuan bagi badan pendapatan kabupaten pesisir selatan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan badan pendapatan kabupaten pesisir selatan tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD 2018

BAB III : Rencana Kerja Tahun 2018 yang mencakup

- Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.
- Indikator Kinerja, kelompok sasaran yang menggambarkan Pencapaian Renstra OPD.
- Dana Indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju tahun 2019 berdasarkan pagu indikatif.
- Sumber dana/pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan program/kegiatan.

BAB IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

Pada tahun anggaran 2017 Renja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan sudah terbentuk dengan total anggaran Rp.3.832.309.304,- dan realisasi anggaran Rp.3.593.422.839,- atau 94,72 %

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan

a. Tugas dan Fungsi (Tupoksi)

- 1) Badan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otomomi dibidang Pendapatan.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat 1, Badan Pendapatan mempunyai fungsi :
 - Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan.
 - Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan.
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan.
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
 - Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan PBB Perkotaan/Perdesaan.
 - Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan PBB Perkotaan/Perdesaan.
 - Pembinaan unit pelaksana teknis dinas.
 - Pengguna anggaran dinas.
 - Penggunaan badan dinas.
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
 - Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

b. Sumber Daya Manusia Aparatur

- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.

- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

c. Sarana dan Prasarana

- Mengembangkan informasi teknologi serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan bidang pendapatan.
- Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
- Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
- Peningkatan sarana dari prasarana pelayanan badan pendapatan sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan akses pelayanan yang nyaman, bermutu dan berkualitas.
- Penataan ruangan kerja untuk memenuhi standar pelayanan yang layak.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2018

3.1 Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini merupakan ukuran kinerja dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada indikator kinerja mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan Indikator Kinerja Utama yang lebih idealistik.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah di atas, yaitu:

1. Mengkoordinasikan penerimaan PAD melalui kerjasama efektif dengan instansi terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dan memberikan pelayanan pajak yang maksimal guna peningkatan pendapatan daerah.
3. Meningkatkan koordinasi penagihan, pemeriksaan dan pengendalian operasional.
4. Melakukan monitoring, rekonsiliasi serta memberikan pelaporan terhadap penerimaan pendapatan daerah.
5. Mewujudkan tim kerja yang memiliki etos kerja yang baik dan profesional

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran umum yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan antara lain:

1. Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dengan indikator tingkat kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah setiap tahun.
2. Terwujudnya pembinaan dan penertiban pajak dan retribusi melalui penggalian sumber-sumber dan potensi pendapatan baru dengan indikator semakin meningkatnya pendapatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan
3. Terwujudnya sistem, mekanisme dan prosedur penagihan Pendapatan Asli Daerah, dengan indikator meningkatnya tertib administrasi perencanaan, pemungutan, pengendalian dan pelaporan pada pendapatan daerah.
4. Terwujudnya peningkatan pengendalian monitoring, rekonsiliasi dan evaluasi.

5. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan kinerja kelembagaan dengan indikator meningkatnya kompetensi dan profesionalisme di bidang pendapatan.

Program dan Kegiatan

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor.
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
11. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4. Pengadaan Meubiler
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Perlengkapan Kantor
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

D. Pengembangan Data/Informasi

1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan

E. Program Peningkatan, Pengembangan, Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
2. Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah

3. Penyusunan laporan PAD
4. Cetak massal dan pengadaan bahan-bahan dokumen PBB-P2
5. Pengadaan barang kuasi
6. Pendataan dan verifikasi nomor objek pajak PBB-P2
7. Monitoring dan evaluasi PAD
8. Sosialisasi pajak daerah
9. Pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah wilayah I
10. Pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah wilayah II
11. Pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah wilayah III
12. Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah
13. Verifikasi Penetapan Pajak Daerah
14. Pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

3.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Yang Menggambarkan Pencapaian Renstra Opd

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja badan pendapatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah :

1. Persentase Peningkatan PAD
2. Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
3. Rasio Biaya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah

3.3 Dana Indikatif Beserta Sumbernya Serta Perkiraan Maju Tahun 2019 Berdasarkan Pagu Indikatif.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan OPD Tahun 2018 dan perkiraan maju tahun 2019 Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sesuai tabel berikut :

TABEL
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019
BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESIR SELATAN

No	Urusan Bidang/Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	9	10
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN								
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				556.248.072			611.872.879
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Kewajiban Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Badan Pendapatan	BAPEN	1 Tahun	80.205.408	APBD	1 Tahun	88.225.949
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan (Bulanan, Trivulan, Semester dan Tahunan)	BAPEN	100%	85.000.000	APBD	100%	93.500.000
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya suasana kantor yang bersih dan nyaman	BAPEN	1 Tahun	30.629.200	APBD	1 Tahun	33.692.120
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhi kebutuhan Alat Tulis Kantor dalam 12 Bulan	BAPEN	1 Tahun	35.000.000	APBD	1 Tahun	38.500.000
5	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Terpenuhi kebutuhan Barang Cetakan dan Pengandaan	BAPEN	1 Tahun	28.921.600	APBD	1 Tahun	31.813.760
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhi kebutuhan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BAPEN	1 Tahun	16.183.000	APBD	1 Tahun	17.801.300
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Referensi Perundang-undangan	BAPEN	1 Tahun	9.100.000	APBD	1 Tahun	10.010.000
8	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhi makan-minum tamu dan piket	BAPEN	1 Tahun	30.000.000	APBD	1 Tahun	33.000.000
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BAPEN	1 Tahun	120.000.000	APBD	1 Tahun	132.000.000
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	BAPEN	1 Tahun	85.000.000	APBD	1 Tahun	93.500.000
11	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan (Renja, Renstru, KUA PPAS, RKA, DPA, LAKIP, TAPKIN dan SAKIP)	BAPEN	Renja, Renstru, KUA PPAS, RKA, DPA, LAKIP, TAPKIN dan SAKIP	36.208.864	APBD	Renja, Renstru, KUA PPAS, RKA, DPA, LAKIP, TAPKIN dan SAKIP	39.829.750

No	Usulan Bidang/Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
I	2	3	4	5	6	7	9	10
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
1	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Tersedianya Kendaraan Operasional Kantor	BAPEN	4 bh kendaraan dinas	64.000.000	APBD		555.500.000
2	2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang memadai	BAPEN	1 Tahun	45.000.000	APBD	1 Tahun	49.500.000
3	3 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang memadai	BAPEN	100%	35.000.000	APBD	100%	38.500.000
4	4 Pengadaan meubiler	Tersedianya Kebutuhan Meubiler yang memadai	BAPEN	Kursi Kerja Staf dan Lemari Arsip	75.000.000	APBD	Kursi Kerja Staf dan Lemari Arsip	82.500.000
5	5 Penyediaan Jasa Perbaikan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Kerja yang memadai	BAPEN	1 Tahun	50.000.000	APBD	1 Tahun	55.000.000
6	6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Kerja yang memadai	BAPEN	1 Tahun	50.000.000	APBD	1 Tahun	55.000.000
7	7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	BAPEN	1 Tahun	100.000.000	APBD	1 Tahun	110.000.000
8	8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	BAPEN	1 Tahun	150.000.000	APBD	1 Tahun	165.000.000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
1	1 Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pendapatun	BAPEN	6 Orang	50.000.000	APBD	7 Orang	55.000.000
IV	Pengembangan Data/Informasi							
1	1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Terinformasinya Program Pembangunan Kepada Masyarakat	BAPEN	1 Tahun	35.000.000	APBD	1 Tahun	38.500.000
V	Program Peningk. Pengemb. Pengelolaan Keuangan Daerah							
1	1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terdatanya potensi objek pajak baru yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan	BAPEN	100%	100.000.000	APBD	100%	110.000.000
2	2 Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah	Diperolehnya data Pendapatan Asli Daerah dari Berbagai sumber yang akurat dan terkini	BAPEN	5 Kali	200.927.720	APBD	5 Kali	221.020.492

No	Urutan Bidang/Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3	Penyusunan laporan PAD	Tersusunnya Laporan Pendapatan Asli Daerah	BAPEN	Buku laporan	295.070.348	APBD	Buku laporan	324.577.383
4	Cetak Massal dan pengadaan bahan-bahan Dokumen PBB-P2	Tersedianya Blanko SKP PBB-P2	BAPEN	SPPT, DHKP, STTS, TTIS	300.000.000	APBD	SPPT, DHKP, STTS, TTIS	330.000.000
5	Pengadaan barang kuasi	Tersedianya Karcis Retribusi/anda masuk/perkir	BAPEN	1 Paket	88.000.000	APBD	1 Paket	96.800.000
6	Pendataan dan verifikasi nomor objek pajak PBB-P2	Tersedianya Data Objek Pajak PBB-P2 yang Akurat dan Terkini dan Diperolehnya data Piutang PBB-P2 yang akurat	BAPEN	3 Wilayah (15 Kecamatan)	270.000.000	APBD	3 Wilayah (15 Kecamatan)	297.000.000
7	Monitoring dan Evaluasi PAD	Diperolehnya data capaian Pendapatan Asli Daerah yang akurat dan Diperolehnya data capaian pajak PBB-P2	BAPEN	1 Tahun	250.000.000	APBD	1 Tahun	275.000.000
8	Sosialisasi pajak daerah	Tersosialisasinya Pajak Daerah kepada seluruh Stakeholder	BAPEN	3 Wilayah (15 Kecamatan)	120.000.000	APBD	3 Wilayah (15 Kecamatan)	132.000.000
9	Pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah wilayah I	Terlaksananya Pelayanan dan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah I	BAPEN	1 Tahun	300.000.000	APBD	1 Tahun	330.000.000
10	Pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah wilayah II	Terlaksananya Pelayanan dan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah II	BAPEN	1 Tahun	200.000.000	APBD	1 Tahun	220.000.000
11	Pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah wilayah III	Terlaksananya Pelayanan dan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III	BAPEN	1 Tahun	200.000.000	APBD	1 Tahun	220.000.000
12	Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah	Tersedianya Data Potensi Pajak Daerah	BAPEN	3 Wilayah (15 Kecamatan)	160.000.000	APBD	3 Wilayah (15 Kecamatan)	176.000.000
13	Verifikasi Penetapan Pajak Daerah	Terverifikasinya Penetapan Pajak Daerah	BAPEN	100%	92.000.000	APBD	100%	101.200.000
14	Pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	Tersedianya data Nilai Jual Objek Pajak baru	BAPEN	1 Kecamatan	240.000.000	APBD	1 Kecamatan	264.000.000
TOTAL					4.026.246.140			4.388.470.754

Padang, 30 Agustus 2017

Kepala Badan Pendapatan
Kabupaten Pesisir Selatan

